

PERAN HUKUM BISNIS DALAM MENJAMIN KEPATUHAN PERIZINAN USAHA CLUB MALAM

Sari Dewi Nasution¹, Panca Budi², Bagusgunawan³, Bambang Fitrianto⁴
dewinasutionsari@gmail.com¹, gugunbineria@gmail.com², bagusagus0098@gmail.com³,
bambangfitrianto@dosen.pancabudi.ac.id⁴

Universitas Panca Budi

ABSTRAK

Perizinan usaha club malam merupakan aspek penting dalam dunia bisnis untuk memastikan operasional yang legal dan sesuai dengan regulasi pemerintah. Penelitian ini membahas peran hukum bisnis dalam menjamin kepatuhan pengusaha club malam terhadap aturan yang berlaku, termasuk perizinan usaha club malam dan izin minuman beralkohol. Melalui analisis normatif terhadap perturan peraturan perundang-undangan terkait, ditemukan bahwa meskipun regulasi telah di terapkan, tantangan seperti kurangnya pengawasan, praktik korupsi dan rendahnya kesadaran hukum masih menjadi hambatan dalam penerapannya,. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan pengawasan, transparansi perizinan, dan sosialisasi untuk menciptakan industri hiburan malam yang lebih tertib dan sesuai hukum

Kata Kunci : Hukum Bisnis, Perizinan Usaha, Club Malam.

ABSTRACT

Night club business licensing is an important aspect in the business world to ensure legal operations and comply with government regulations. This research discusses the role of business law in ensuring compliance by nightclub entrepreneurs with applicable regulations, including nightclub business permits and permits for the sale of alcoholic beverages. Through normative analysis of related laws and regulations have been established, challenges such as lack of supervision, corrupt practices, and low legal awareness are still obstacles to their implementation. This research recommends increasing supervisions, transparency of licensing, and socialization of regulations to create a nightlife industry that is more orderly and in accordance with the law

Keywords: Business law, Business Licensing, Nightclub

PENDAHULUAN

Beberapa kasus peredaran narkoba terjadi di club malam yang ada di Indonesia, seperti contohnya kasus Diskotik key yang berada di lokasi kota Binjai provinsi Sumatera utara. Sebenarnya masih banyak lagi tempat-tempat club malam yang tertangkap kamera dan beredar di sosial media sedang terjadi transaksi maupun penyalahgunaan narkoba dan sex bebas di dalamnya. Namun hanya beberapa tempat yang di tutup oleh pemerintah selebihnya terkesan di tutupi dan tidak dituntaskan permasalahan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pengusaha club malam. Indonesia menjadi sarang peredaran narkoba yang sangat mengkhawatirkan untuk saat ini, tercatat pada tahun 2024 ini jumlah penyalahgunaan narkoba telah mencapai angka 3,3 juta orang ungkap mantan kepala Badan Intelijen Negara (BIN) "Budi Gunawan" yang saat ini menjabat Menteri koordinator bidang politik dan keamanan. Pecandu narkoba saat ini di dominasi oleh remaja yang masih berusia dibawah 17 tahun.

Pergaulan yang terlalu bebas dari pengawasan orang tua menyebabkan angka pengguna narkoba di lingkungan remaja semakin meningkat. Selain itu terjerumusnya anak-anak remaja ke dunia malam yang penuh dengan hura-hura dan kebebasan menjadi pendukung mudahnya penyebaran narkoba ini. Seharusnya pemerintah lebih

sering mengawasi kegiatan yang dilakukan para pengunjung club malam agar para pengusaha club malam tidak menyalah gunakan perizinan yang telah diberikan kepada mereka untuk membuka usaha club malam. Seharusnya ada pemantauan baik dari segi umur yang diperbolehkan mengunjungi club malam, tes urin bagi para pengunjung dan pengawasan dengan memerintahkan aparat sebagai pengawas di semua tempat club malam. Pada jurnal ini kami akan mencoba membahas salah satu permasalahan usaha club malam diskotik sky dan mencoba menganalisis penyebab mengapa tempat usaha diskotik sky ini dapat membangun tempat dan beroperasi selama ini tanpa ada hambatan tanpa ada hambatan dari segi perizinan oleh pemerintah. Dari kasus ini akan terlihat kurangnya fungsi aparaturnegara dalam menjamin penegakan hukum yang telah di tetapkan. Ataukah hanya ulah beberapa oknum saja yang menyebabkan usaha club malam ilegal seperti diskotik sky ini bisa berkembang dan seharusnya dari kasus ini perlu lebih analisis lebih mendalam terhadap usaha-usaha club malam yang lainnya apakah sudah mengantongi izin yang sesuai ketentuan yang di tetapkan pemerintah indonesia atau sebaliknya.

Keberadaan club malam sebagai tempat hiburan seharusnya tidak hanya menjadi sarana bisnis yang menguntungkan tetapi juga menguntungkan tetapi juga mempertimbangkan dampak sosial dan hukum. Jika di kelola sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, club malam dapat memberikan kontribusi positif bagi perekonomian dan menciptakan lapangan kerja baru. Namun, kenyataan menunjukkan bahwa pelanggaran seperti peredaran narkoba dan aktivitas ilegal lainnya masih sering terjadi. Lemahnya penegakan hukum dan pengawasan yang tidak konsisten menjadi penyebab utama tingginya pelanggaran di industri hiburan malam. Oleh karena itu, diperlukan peran hukum bisnis yang tegas dalam mengatur operasional club malam agar sesuai standar yang di tetapkan dan meminimalkan dampak negatif terhadap masyarakat

METODOLOGI

Penelitian ini berfokus pada kajian peraturan perundang-undangan yang berlaku dan penerapannya terhadap masalah hukum tertentu. Dalam konteks ini, menganalisis undang-undang yang mengatur perizinan usaha club malam dan bagaimana hukum tersebut diimplementasikan untuk memastikan kepatuhan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Peran Hukum Bisnis:

Hukum bisnis berfungsi sebagai kerangka regulasi yang mengatur operasional club malam, memastikan bahwa semua kegiatan usaha dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ini termasuk perlunya izin usaha, sertifikasi keamanan, dan kepatuhan terhadap standar kesehatan. Hukum bisnis memainkan peran yang sangat penting dalam mengatur operasional club malam di Indonesia.

Berikut adalah beberapa aspek yang menjelaskan peran tersebut:

- a. **Kerangka Regulasi:** Hukum bisnis menyediakan kerangka regulasi yang jelas bagi pengusaha club malam untuk beroperasi. Regulasi ini mencakup berbagai aspek, mulai dari perizinan hingga standar operasional. Dengan adanya regulasi yang terstruktur, pengusaha dapat memahami kewajiban hukum mereka dan menjalankan usaha dengan lebih terencana.
- b. **Izin Usaha:** Salah satu syarat utama untuk menjalankan club malam adalah memperoleh izin usaha yang sah. Proses pengajuan izin melibatkan pemeriksaan lokasi, penilaian dampak lingkungan, dan kepatuhan terhadap ketentuan zonasi. Izin usaha tidak hanya memberikan legalitas kepada pengusaha tetapi juga melindungi

konsumen dengan memastikan bahwa usaha tersebut telah memenuhi standar yang ditetapkan.

- c. **Sertifikasi Keamanan:** Sertifikasi keamanan, seperti Sertifikat Kelayakan Operasional (SKO), adalah hal yang penting bagi club malam. Sertifikasi ini memastikan bahwa tempat tersebut memenuhi standar keselamatan yang diperlukan, baik dari segi bangunan maupun operasional. Dengan memiliki sertifikasi ini, pengusaha menunjukkan komitmen terhadap keselamatan pengunjung dan karyawan.
- d. **Kepatuhan terhadap Standar Kesehatan:** Hukum bisnis juga mengatur kepatuhan terhadap standar kesehatan, termasuk sanitasi dan kebersihan tempat usaha. Dalam konteks club malam, hal ini sangat penting untuk menjamin kenyamanan dan kesehatan pengunjung. Pengusaha diharapkan untuk mematuhi regulasi kesehatan yang berlaku, termasuk pengelolaan limbah dan penyediaan fasilitas sanitasi yang memadai.
- e. **Perlindungan Konsumen:** Dengan adanya hukum bisnis yang mengatur operasional club malam, perlindungan konsumen juga menjadi lebih terjamin. Regulasi yang ketat membantu mencegah praktik-praktik bisnis yang merugikan konsumen, seperti penipuan atau penyalahgunaan wewenang. Ini menciptakan kepercayaan di kalangan masyarakat terhadap industri hiburan malam.
- f. **Penegakan Hukum:** Hukum bisnis tidak hanya berfungsi sebagai panduan tetapi juga sebagai alat penegakan hukum. Pemerintah memiliki kewenangan untuk melakukan inspeksi dan penegakan hukum terhadap pelanggaran regulasi. Tindakan tegas terhadap pelanggaran dapat memberikan efek jera bagi pengusaha lain dan mendorong kepatuhan secara keseluruhan.

Peran hukum bisnis dalam menjamin kepatuhan perizinan usaha club malam sangatlah signifikan. Dengan menyediakan kerangka regulasi yang jelas dan menegakkan kepatuhan terhadap izin usaha, sertifikasi keamanan, dan standar kesehatan, hukum bisnis membantu menciptakan lingkungan usaha yang aman dan bertanggung jawab. Upaya kolaboratif antara pemerintah dan pelaku industri diperlukan untuk memastikan bahwa semua pihak memahami dan mematuhi regulasi yang ada demi keberlangsungan industri hiburan malam yang sehat dan berkelanjutan.

2. Tantangan dalam Penegakan Hukum:

Meskipun ada regulasi yang jelas, tantangan dalam penegakan hukum tetap ada. Beberapa pengusaha masih beroperasi tanpa izin atau melanggar ketentuan yang ada karena kurangnya pengawasan atau penegakan yang tegas dari pihak berwenang.

Meskipun regulasi yang mengatur operasional club malam di Indonesia sudah cukup jelas dan komprehensif, tantangan dalam penegakan hukum tetap menjadi masalah yang signifikan. Beberapa faktor yang berkontribusi terhadap tantangan ini meliputi:

- a. **Kurangnya Pengawasan yang Konsisten:** Salah satu tantangan utama dalam penegakan hukum adalah kurangnya pengawasan yang konsisten dan menyeluruh dari pihak berwenang. Meskipun ada mekanisme pengawasan yang ditetapkan, keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran di instansi pemerintah sering kali menghambat kemampuan mereka untuk melakukan inspeksi rutin. Hal ini dapat menyebabkan beberapa club malam beroperasi tanpa izin atau tidak mematuhi ketentuan yang ada.
- b. **Pelanggaran oleh Pengusaha:** Beberapa pengusaha club malam masih beroperasi tanpa izin atau melanggar ketentuan yang ada, seperti jam operasional dan batasan usia pengunjung. Pelanggaran ini sering kali terjadi karena pengusaha merasa bahwa

risiko untuk terdeteksi rendah, terutama jika pengawasan tidak dilakukan secara ketat. Dalam beberapa kasus, pengusaha mungkin juga menganggap bahwa biaya untuk mendapatkan izin terlalu tinggi atau prosesnya terlalu rumit.

- c. **Praktik Korupsi:** Dalam beberapa situasi, praktik korupsi dapat mempengaruhi penegakan hukum. Terdapat kemungkinan bahwa beberapa pengusaha dapat "menghindari" sanksi dengan memberikan suap kepada pejabat terkait, sehingga mengurangi efektivitas regulasi dan menciptakan ketidakadilan di pasar. Praktik semacam ini merusak integritas sistem perizinan dan menciptakan lingkungan usaha yang tidak sehat.
- d. **Kesadaran Hukum yang Rendah:** Tingkat kesadaran hukum di kalangan pengusaha juga menjadi tantangan. Beberapa pengusaha mungkin tidak sepenuhnya memahami pentingnya kepatuhan terhadap regulasi atau konsekuensi dari pelanggaran hukum. Kurangnya pemahaman ini dapat menyebabkan mereka mengambil risiko dengan tidak mematuhi peraturan.
- e. **Respon Masyarakat Terhadap Pelanggaran:** Masyarakat juga memiliki peran dalam penegakan hukum melalui pelaporan pelanggaran. Namun, jika masyarakat tidak merasa aman atau percaya diri untuk melaporkan pelanggaran karena takut akan pembalasan atau kurangnya respons dari pihak berwenang, maka hal ini dapat menghambat upaya penegakan hukum.

Tantangan dalam penegakan hukum terhadap regulasi usaha club malam di Indonesia menunjukkan bahwa meskipun ada kerangka hukum yang jelas, implementasinya sering kali terhambat oleh berbagai faktor. Untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum, diperlukan peningkatan kapasitas pengawasan oleh pemerintah, edukasi dan sosialisasi mengenai kepatuhan hukum bagi pengusaha, serta upaya untuk memberantas praktik korupsi. Dengan demikian, lingkungan usaha akan lebih kondusif bagi semua pihak dan kepatuhan terhadap regulasi dapat ditingkatkan secara signifikan.

3. Rekomendasi untuk Peningkatan Kepatuhan:

Diperlukan peningkatan sosialisasi mengenai regulasi perizinan kepada pengusaha club malam agar mereka lebih memahami pentingnya kepatuhan hukum. Selain itu, pemerintah perlu meningkatkan frekuensi pengawasan dan memberikan sanksi tegas bagi pelanggar untuk menciptakan efek jera. Untuk meningkatkan kepatuhan perizinan usaha club malam, beberapa rekomendasi dapat diberikan:

1) Peningkatan Sosialisasi Mengenai Regulasi Perizinan

- **Edukasi dan Sosialisasi:** Pemerintah harus meningkatkan program edukasi dan sosialisasi mengenai regulasi perizinan kepada pengusaha club malam. Program ini dapat berupa seminar, workshop, dan materi online yang menjelaskan secara detail tentang persyaratan perizinan, proses pengajuan izin, serta konsekuensi dari pelanggaran.
- **Partnership dengan Asosiasi Industri:** Kolaborasi dengan asosiasi industri hiburan malam dapat membantu dalam menyebarkan informasi yang tepat dan relevan kepada anggota mereka. Asosiasi ini dapat menjadi platform yang efektif untuk menyampaikan pesan-pesan penting mengenai kepatuhan hukum.
- **Media Promosi:** Menggunakan media promosi seperti brosur, poster, dan iklan daring dapat membantu menyebarkan informasi tentang regulasi perizinan kepada target audiens yang lebih luas.

2) Peningkatan Frekuensi Pengawasan

- **Inspeksi Rutin:** Pemerintah harus meningkatkan frekuensi inspeksi rutin terhadap club malam untuk memastikan bahwa mereka mematuhi regulasi yang berlaku.

Inspeksi ini harus dilakukan secara acak dan tidak prediktif untuk menghindari manipulasi dari pihak yang sedang melakukan pelanggaran.

- **Monitoring Online:** Menggunakan teknologi monitoring online dapat membantu memantau aktivitas club malam secara real-time, terutama pada hari-hari libur atau waktu-waktu tertentu ketika inspeksi fisik sulit dilakukan.

3) Memberikan Sanksi Tegas

- **Sanksi yang Tepat:** Pemerintah harus memberikan sanksi yang tegas bagi pelanggaran perizinan usaha club malam. Sanksi ini dapat berupa denda, pencabutan izin operasional sementara, atau bahkan permanen. Sanksi yang tegas ini dapat menciptakan efek jera bagi pengusaha yang belum memahami pentingnya kepatuhan hukum.
- **Transparansi Prosedur:** Prosedur penegakan hukum harus transparan dan adil. Pengusaha harus tahu apa saja yang mereka lakukan salah dan bagaimana mereka dapat membetulkannya. Transparansi ini membantu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah.

Dengan meningkatkan sosialisasi mengenai regulasi perizinan dan intensitas pengawasan, serta memberikan sanksi tegas bagi pelanggar, pemerintah dapat meningkatkan kepatuhan perizinan usaha club malam secara signifikan. Strategi ini tidak hanya membantu menjaga keamanan dan kenyamanan masyarakat tetapi juga mempromosikan lingkungan usaha yang seimbang dan berkelanjutan.

4. Implikasi bagi Kebijakan Publik:

Temuan ini menunjukkan bahwa kebijakan publik terkait perizinan usaha harus lebih responsif terhadap dinamika industri hiburan malam. Penyesuaian regulasi mungkin diperlukan untuk mengakomodasi perkembangan industri sambil tetap menjaga kepentingan masyarakat.

Temuan dari penelitian ini mengindikasikan bahwa kebijakan publik terkait perizinan usaha, khususnya dalam industri hiburan malam, perlu ditinjau dan disesuaikan agar lebih responsif terhadap dinamika yang terjadi.

Berikut adalah beberapa implikasi yang dapat diambil untuk pengembangan kebijakan publik:

a. Responsivitas terhadap Dinamika Industri

- **Penyesuaian Regulasi:** Kebijakan perizinan harus mampu beradaptasi dengan perubahan dan perkembangan dalam industri hiburan malam. Ini termasuk mempertimbangkan tren baru, seperti pertumbuhan bisnis hiburan digital dan perubahan preferensi konsumen. Regulasi yang kaku dapat menghambat inovasi dan pertumbuhan industri.
- **Keterlibatan Stakeholder:** Proses penyusunan kebijakan harus melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pengusaha, masyarakat, dan ahli hukum. Keterlibatan ini penting untuk memahami kebutuhan dan tantangan yang dihadapi oleh industri serta untuk menciptakan regulasi yang lebih relevan.

b. Peningkatan Kualitas Perizinan

- **Sistem Perizinan yang Efisien:** Pemerintah perlu mengembangkan sistem perizinan yang lebih efisien dan transparan. Penggunaan teknologi informasi untuk mempermudah proses pengajuan izin dan monitoring kepatuhan dapat membantu mempercepat proses dan mengurangi birokrasi yang rumit.
- **Standar Kelayakan yang Jelas:** Penetapan standar kelayakan operasional yang jelas dan terukur bagi club malam akan membantu pengusaha memahami apa yang diharapkan dari mereka. Hal ini juga akan memudahkan pemerintah dalam melakukan penilaian saat memberikan izin.

c. Perlindungan Masyarakat

- **Keseimbangan antara Pertumbuhan Ekonomi dan Perlindungan Masyarakat:** Kebijakan publik harus menyeimbangkan antara mendorong pertumbuhan ekonomi di sektor hiburan malam dengan perlindungan terhadap masyarakat. Ini mencakup pengaturan jam operasional, batasan usia pengunjung, serta ketentuan mengenai keamanan dan kesehatan.
- **Sosialisasi kepada Masyarakat:** Masyarakat perlu dilibatkan dalam proses pembuatan kebijakan melalui sosialisasi mengenai hak-hak mereka sebagai konsumen dan warga negara. Ini akan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya regulasi dan mendorong mereka untuk melaporkan pelanggaran.

d. Evaluasi Berkala

- **Monitoring dan Evaluasi Kebijakan:** Pemerintah harus melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan perizinan usaha club malam. Evaluasi ini penting untuk menilai efektivitas regulasi yang ada serta untuk melakukan penyesuaian jika diperlukan.

Implikasi bagi kebijakan publik menunjukkan bahwa ada kebutuhan mendesak untuk menyesuaikan regulasi perizinan usaha dengan dinamika industri hiburan malam. Dengan melibatkan pemangku kepentingan, meningkatkan efisiensi sistem perizinan, menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan perlindungan masyarakat, serta melakukan evaluasi berkala, pemerintah dapat menciptakan lingkungan usaha yang lebih sehat dan berkelanjutan. Hal ini tidak hanya akan mendukung perkembangan industri hiburan malam tetapi juga melindungi kepentingan masyarakat secara keseluruhan.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian tentang peran hukum bisnis dalam menjamin kepatuhan perizinan usaha club malam, dapat disimpulkan bahwa regulasi perizinan yang ada di Indonesia sudah cukup memadai, namun implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan. Tantangan utama mencakup kurangnya pengawasan yang konsisten, praktik korupsi, serta rendahnya kesadaran hukum di kalangan pengusaha. Oleh karena itu, di perlukan pengawasan yang lebih ketat, sosialisasi regulasi yang intensif, dan penerapan sanksi tegas bagi pelanggar. Kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan pengusaha sangat penting untuk menciptakan industri hiburan yang lebih tertib dan sesuai hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- <https://nasional.kompas.com> Angka Pecandu Narkoba Pada Pada Tahun 2024
<https://regional.kompas.com> kasus di diskotik sky jadi tempat Prostitusi dan peredaran narkoba tahun 2023
- Lestari, M., & Hidayat, F. (2022). Penegakan Hukum Dan Pengawasan Di Industri Hiburan Malam. *Jurnal Keamanan Dan Ketertiban Publik*, 10(2), 123-140.
- Victorianus, & Randa Puang. (2015). *Hukum Pendirian Usaha Dan Perijinan*
Website :
- Wijaya, R.,& Santoso, D. (2020). Kontribusi Hukum Bisnis Dalam Industri Hiburan malam. *Jurnal Hukum Dan Kebijakan Publik*, 7(3),89-110.